



PT. BPR ARTAMAS

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT BPR Artamas berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Artamas tahun 2023 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Iwan Ananto Satputro
	NIK *) : 3374110704710004
	Jabatan : 0100.Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Menghimpun dana; 2) Menyalurkan kredit; 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Nama : Dedy Tri Nugroho Sulistiyanto
	NIK *) : 3374061305750005
	Jabatan : 0101 Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : Membantu Direktur utama dalam mengelola PT BPR Artamas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur sesuai dengan ketentuan yang ada

3	Nama	: Andrian Ardi Wibowo
	NIK *)	: 3374082409960004
	Jabatan	: 0200 Direktur YMFK
	Tugas dan Tanggung Jawab :	a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. b. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt. c. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yg berkualitas, Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian operasional, Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen sumber daya manusia yg handal & kompeten, serta meningkatkan kualitas SDM itu sendiri, Direksi telah mengembangkan produk & layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital dan kebutuhan nasabah yang berkembang, Direksi telah memberikan perhatian kepada proses –proses operasional yang memiliki risiko tinggi akibat human error agar di evaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem dan Direksi juga telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Priyono
	NIK *)	: 3374132707610001
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Nama	: Rabu Handoko Murdijantoro
	NIK *)	: 3374020107530004
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta

	memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
Rekomendasi kepada Direksi: Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yg berkualitas, Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian operasional, Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen sumber daya manusia yg handal & kompeten, serta meningkatkan kualitas SDM itu sendiri, Direksi telah mengembangkan produk & layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital dan kebutuhan nasabah yang berkembang, Direksi telah memberikan perhatian kepada proses –proses operasional yang memiliki risiko tinggi akibat human error agar di evaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem dan Direksi juga telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite ***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunesasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

***) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko-
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi-
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan Realisasi program kerja.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Iwan Ananto Satputro	3374110704710004	Tidak Ada	Tidak Ada-
2	Dedy Tri Nugroho Sulistiyanto	3374061305750005	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Andrean Ardi Wibowo	3374082409960004	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Iwan Ananto Satputro	3374110704710004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Dedy Tri Nugroho Sulistiyanto	3374061305750005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Andrean Ardi Wibowo	3374082409960004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)
----	----------------------	--------	-----------------------

			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Iwan Ananto Satputro	3374110704710004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Dedy Tri Nugroho Sulistiyanto	3374061305750005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Andrean Ardi Wibowo	3374082409960004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Iwan Ananto Satputro	3374110704710004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Dedy Tri Nugroho Sulistiyanto	3374061305750005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Andrean Ardi Wibowo	3374082409960004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Priyono	3374132707610001	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rabu Handoko Murdijantoro	3374020107530001	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Priyono	3374132707610001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rabu Handoko Murdijantoro	3374020107530001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Priyono	3374132707610001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rabu Handoko Murdijantoro	3374020107530001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Priyono	3374132707610001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rabu Handoko Murdijantoro	3374020107530001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	3	434.000.000	2	318.000.000
2	Tunjangan	3	0	2	0
3	Tantiem	3	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	2	0
5	Remunerasi lainnya **)	3	0	2	0
Total			434.000.000		318.000.000

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Direksi mendapat fasilitas Mobil Dinas	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Fasilitas Lainnya *)	Biaya pemakaian telepon seluler masing-masing Direksi mendapat 1 (satu) nomor CUG sebesar 100 Ribu	Tidak Ada

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,15	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,35	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,04	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,44	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,35	:	1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	09-3-2023	4	Membahas sumber daya manusia,Data Hapus buku,KAP, RUPS Direktur YMFK,Perbaikan NPL,Lelang,Kegiatan Operasional
2	16-3-2023	4	Lap penyesuaian Gaji 2023,Pemaparan realisasi hapus buku 2022,pembahasan hasil audit dari KAP th 2022,Rencana RUPS di bulan april 2023,Pembahasan pinjaman karyawan dan SLIK Karyawan
3	28-3-2023	4	RUPSLUB 2023,Pembagian tugas & tanggung jawab direksi,pebaikan NPL & KYD baru,Rencana ekspansi kanor didaerah semarang,jam operasional & keamanan BPR saat bulan Ramadhon,Peningkatan kompetensi SDM.
4	5-4-2023	4	Pembahasan Laporan Hasil Permeriksaan OJK dan cakupan laporan audit intern
5	10-4-2023	2	Upaya pencegahan NPKdari Tim bisnis,Pencabutan memo reward karyawan,Revisi kebijakan BWMK,Struktur organisasi 2023
6	2-5-2023	4	Rencana pembukaan kantor Kas BPR Artamas,Kemampuan BPR dalam meningkatkan pemodalan,Evaluasi kebijakan dan proses kredit,Strategi blm mei untuk mencapai RBB,program insentif & kesejahteraan karyawan,meningkatkan kaderisasi calon seorang leader dari internal BPR Artamas
7	22-5-2023	2	Finalisasi KPI karyawan 2023,Finalisasi insentif karyawan 2023 dan rotasi karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas
8	13-7-2023	4	Kinerja agustu 2023,Waspada dan preventif terhadap fraud,Meningkatkan fungsi audit,rotasi karyawan,Meningkatkan pengawasan terhadap system internal
9	3-10-2023	4	Pembagian tugas & tanggung jawab dengan calon direktur baru,Strategi baru untuk mengejar kekurangan target RBB,Meningkatkan prinsip kehati-hatian terhadap proses kredit,Waspada terhadap sektor ekonomi yang mempunyai NPL tinggi,Review pick up tabungan nasabah,Meningkatkan fungsi pengawasan dan pencegahan terjadinya fraud.
10	19-12-2023	5	Pmbahasan kinerja Nopember 2023,persiapan penunjukan KAP,Reminder lapoaran pengawasan oleh Komisaris Dan laporan kinerja semester 2,Persiapan pembukaan kantor kas di tahun 2024,pembahasan proses dan kualitas kredit BPR Artamas.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Priyono		10	0	100 %
2	Rabu Handoko Murdijantoro		10	0	100 %

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian**)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2-2-2023	Sosial	Iuaran Bulan RT 6 RW 2 Mranggen demak	Ketua RT	120.000
2	27-2-2023	Sosial	Karangan Bunga Ucapan Berduka cita untuk orang tua karyawan an Eko W	Keluarga Duka	550.000
3	13-3-2023	Sosial	Karangan Bunga Ucapan Berduka cita untuk ibu dari Direktur Utama	Keluarga Duka	800.000
4	13-3-2023	Sosial	Sumbang Lelayu ibu dari Direktur Utama	Keluarga Duka	200.000
5	14-4-2023	Sosial	Sumbang isteri melahirkan dari karyawan an.MT.Lubab	MT.Lubab	200.000
6	08-6-2023	Sosial	Karangan Bunga Ucapan Berduka cita untuk ibu dari Karyawan an. Katon Kurniawan	Keluarga Duka	400.000
7	09-6-2023	Sosial	Sumbangan Sedekah bumi (Apitan) Desa Kembangarum Mranggen	Panitiia Apitan	200.000
8	26-6-2023	Sosial	Sumbangan Pemilhan Pemuda	Panitia	250.000

			Pancasila Cabang Demak		
9	11-7-2023	Sosial	Sumbangan Berduka cita untuk karyawan an Kiky Z	Keluarga Duka	300.000
10	13-7-2023	Sosial	Sumbangan HUT RI 78 Desa Kembangarum Mranggen	Panitia HUT RI 78	250.000
11	18-7-2023	Sosial	Sumbangan HUT RI 78 RT 6 RW 2 Mranggen	Panitia	250.000
12	21-7-2023	Sosial	Sumbangan isteri karyawan an.Arwan R karena sakit	Isteri Karyawan	200.000
13	17-8-2023	Sosial	Sumbangan karangan bunga berita duka cita untuk nasabah	Keluarga Duka	350.000
14	08-9-2023	Sosial	Sumbangan isteri karyawan an.Nur Khamid karena sakit	Isteri Karyawan	200.000
15	25-9-2023	Sosial	Sumbangan utk karyawan melahirkan an.Dwi Indah K	Karyawan	200.000
16	29-9-2023	Sosial	Sumbangan ibu karyawan an.Zulfa A A karena sakit	Zulfa A.A	200.000
17	10-10-2023	Sosial	Iuran RT 6 RW 2 Desa Kembangarum Mranggen Demak th 2024	Ketua Rt	120.000
18	11-10-2023	Sosila	Sumbangan parkir untuk RT 6 RW 2 Desa Kembangarum Mranggen Demak	Ketua RT	500.000
19	27-12-2023	Sosial	Karangan bunga untuk pernikahan karyawan an.Dwi Umi	Panitia Pernikahan	350.000

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

NO	Kriteria/Indikator	Bobot (%)	Skala Penerapan				
			Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1- Pelaksanaan tugas tanggungjawab Direksi (20 %)	20	1,08	0,70	0,20	1,98	0,396
2	Faktor 2- Pelaksanaan tugas tanggungjawab Dewan Komisaris (15%)	15	0,84	0,80	0,20	1,84	0,276
3	Faktor 3- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite (0,00 %)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Faktor 4-Penanganan benturan kepentingan (10 %)	10	1,00	0,80	0,30	2,10	0,210

5	Faktor 5- Penerapan fungsi kepatuhan (10 %)	10	1,00	0,88	0,23	2,11	0,211
6	Faktor 6-Penerapan fungsi audit intern (10 %)	10	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200
7	Faktor 7- Penerapan fungsi audit ekstern (2,5 %)	2,5	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050
8	Faktor 8- Penerapan Manajemen resiko (10 %)	10	1,00	0,86	0,20	2,06	0,206
9	Faktor 9- Batas maksimum pemberian kredit (7,5 %)	7,5	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150
10	Faktor 10- Rencana bisnis (7,5 %)	7,5	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150
11	Faktor 11- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan (7,5 %)	7,5	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150
Nilai Komposit Sesusah Penerapan Manajemen Risiko							2,00

Hasil Nilai Komposit :

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%		0,396
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%		0,276
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%		0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%		0,210
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%		0,211
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%		0,200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%		0,050
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%		0,206
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%		0,150
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%		0,150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%		0,150
	Nilai Komposit	100%		2,00
	Peringkat Komposit		Baik	

N.KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Artamas telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik hal yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola, Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata kelola BPR, secara umum tersebut tidak signifikan dan masih perlu dilakukan perbaikan perbaikan oleh BPR Artamas.

Dari hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian baik dengan nilai komposit 2 (dua) dari aspek proses Tata Kelola yang efektif dengan di dukung oleh struktur yang lengkap.

Mranggen, Januari 2024

PT. BPR ARTAMAS
Direksi

Iwan Ananto Satputro
Direktur Utama

Dedy Tri Nugroho S
Direktur

Andrean Ardi Wibowo
Direktur YMFK

Mengetahui,
Dewan Komisaris

Priyono
Komisaris Utama

Rabu Handoko Murdijantoro
Komisaris

